

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi yang sedang berlangsung saat ini setidaknya memungkinkan terjadinya perubahan dalam berbagai aspek antar negara di berbagai belahan dunia (lingkungan internasional). Zaman globalisasi ini membuat dunia atau lingkungan internasional tampak seolah-olah menyusut menjadi satu ruang tanpa batas. Interaksi atau komunikasi antar individu dan negara menjadi semakin sederhana untuk mendukung kesepakatan-kesepakatan dan tujuan yang ingin dicapai. (Setiadi, 2015)

Globalisasi merupakan fenomena yang tidak terelakkan dalam kehidupan modern. Terlepas dari kesiapan berbagai pihak, arus globalisasi telah menembus hampir seluruh dimensi kehidupan manusia di berbagai wilayah dunia. Kemajuan pesat teknologi komunikasi, informasi, komputasi, dan transportasi telah menghilangkan batas yang sebelumnya membatasi hubungan antar individu, antar masyarakat, dan antar negara. Melalui inovasi-inovasi tersebut interaksi global kini berlangsung semakin intens dengan kecepatan yang tinggi serta biaya yang relatif lebih ekonomis. (Irawan, 2017)

Transformasi digital dapat dipahami sebagai suatu proses strategis yang mengintegrasikan teknologi digital ke dalam seluruh fungsi dan aktivitas organisasi guna menghasilkan nilai tambah, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendorong terciptanya inovasi berkelanjutan. Proses ini mencakup pemanfaatan beragam teknologi, seperti kecerdasan buatan, big data, otomatisasi, dan Internet of Things (IoT), yang secara fundamental mengubah mekanisme operasional organisasi serta cara layanan disediakan kepada pengguna atau pelanggan. (Biro Publikasi, 2024)

Perkembangan teknologi digital kini telah memasuki fase yang sangat krusial dalam pengelolaan pemerintahan di sejumlah negara. Karena transformasi digital dalam sektor layanan publik yang meliputi pemanfaatan internet, penerapan pemerintahan elektronik, identitas digital, data besar, dan kecerdasan buatan menjadi salah satu fokus utama dalam menghadapi tantangan serta kesempatan di

era Revolusi Industri 4.0 dan masyarakat yang semakin saling terhubung secara global. (Subagyo, 2019)

Perkembangan internet yang terjadi saat ini telah memudahkan dalam memenuhi berbagai keperluan manusia. Sebuah negara bisa disebut maju jika dilihat dari tingkat penguasaan teknologi yang dimilikinya. Masyarakat maupun pemerintahnya menyadari atas kemajuan dalam teknologi serta informasi digital. Internet memainkan peran yang sangat penting bagi sebuah negara, karena kehadiran teknologi dan informasi memberikan kemudahan dalam tata kelola pemerintahan. Layanan digital sangat penting bagi pemerintah untuk menjaga transparansi antara pemerintah dan masyarakat, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan pemerintahan, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga. Saat ini, penggunaan internet di berbagai negara belum merata, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Salah satu alasannya adalah terbatasnya kemampuan negara-negara tersebut dalam mengembangkan teknologi baru. Contoh yang dapat dilihat adalah Indonesia, yang sedang berusaha meningkatkan teknologinya. Penggunaan teknologi di Indonesia masih bisa dibilang belum optimal, karena tingkat kemajuan teknologi di negara ini masih tergolong rendah. Indikator lainnya mencakup kurangnya kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi pada sektor industri, lemahnya sinergi kebijakan, serta sedikitnya jumlah ilmuwan di Indonesia. (Purnamasari, 2019)

Di Indonesia, fenomena globalisasi tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui tingginya tingkat pemanfaatan internet yang telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat. Akses dan penggunaan teknologi digital tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, melainkan berlangsung secara intens dan berkelanjutan dalam berbagai aktivitas. (Setiadi, 2015)

Transformasi digital dalam pelayanan publik dapat dipahami sebagai upaya pembaharuan sistem pelayanan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Perubahan tersebut mencakup peralihan dari mekanisme pelayanan yang bersifat manual menuju sistem yang terintegrasi secara digital sehingga proses pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, serta mudah dijangkau oleh masyarakat. Dalam

praktiknya, transformasi digital tidak hanya terbatas pada penggunaan perangkat teknologi, tetapi juga melibatkan penyesuaian tata kelola birokrasi, pola kerja aparatur, budaya organisasi, hingga bentuk hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung cepat mendorong pemerintah untuk menyesuaikan sistem pelayanan agar mampu memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki layanan yang cepat, praktis, responsif, dan terhubung secara terpadu. Dengan demikian, transformasi digital dipandang sebagai langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern sekaligus meningkatkan mutu pelayanan publik. Sistem pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital, seperti portal pemerintah elektronik, aplikasi seluler, dan berbagai layanan daring lainnya, mempermudah masyarakat Indonesia dalam memperoleh informasi serta layanan publik melalui internet. Dengan adanya sistem ini, masyarakat tidak terganggu oleh kendala fisik dan lokasi yang bisa menghalangi mereka dalam mengakses layanan publik yang mereka butuhkan. Masyarakat bisa memanfaatkan layanan tersebut dari lokasi mana saja dan kapan saja, tanpa harus hadir secara langsung di kantor pemerintah. (Arief, & Abbas, 2021)

Selain itu, pemerintahan yang menggunakan teknologi menawarkan kesempatan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyampaian layanan publik. Dengan memanfaatkan media digital, proses administrasi dapat dilakukan secara online, mengurangi tingkat birokrasi serta waktu yang diperlukan untuk pengajuan dokumen dan permohonan layanan. Masyarakat dapat mengajukan permohonan, memeriksa status permohonan, dan menerima pemberitahuan secara daring, yang dapat menghemat waktu dan tenaga bagi masyarakat serta pihak pemerintah. (Warman dkk., 2022)

Pada penghujung tahun 2019, dunia menghadapi krisis kesehatan global akibat merebaknya virus Covid-19 yang pertama kali teridentifikasi di Wuhan, China. Memasuki maret 2020, Indonesia mulai mencatat peningkatan jumlah kasus yang berlangsung secara cepat dan masif. Lonjakan kasus tersebut mendorong pemerintah menerapkan berbagai pembatasan aktivitas, sehingga hampir seluruh kegiatan sosial, ekonomi, dan pemerintahan dialihkan ke pola daring atau

dilaksanakan secara jarak jauh. Dalam konteks pelayanan publik, kebijakan ini bertujuan meminimalkan risiko penularan, sehingga layanan tatap muka dibatasi dan hanya diterapkan pada sektor-sektor yang bersifat esensial dan tidak dapat dilakukan secara daring. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, pemanfaatan teknologi informasi menjadi elemen utama dalam penyelenggaraan berbagai aktivitas pemerintahan. Kondisi tersebut secara tidak langsung berperan sebagai katalis yang mempercepat implementasi pelayanan publik berbasis digital di Indonesia. Namun demikian, situasi pandemi juga menghadirkan tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan, karena pemerintah dituntut untuk merumuskan kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan sosial dan dinamika politik secara simultan di tengah krisis yang berlangsung. (Tasyah dkk., 2021)

Pandemi Covid-19 memiliki peran signifikan dalam mempercepat proses transformasi pelayanan publik digital di Indonesia. Penerapan pembatasan aktivitas sosial dan pembatasan interaksi tatap muka akibat kondisi darurat kesehatan menuntut pemerintah untuk segera menyesuaikan mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik agar tetap dapat berjalan secara optimal. Dalam situasi tersebut, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi solusi utama untuk memastikan keberlanjutan layanan publik, termasuk di bidang perizinan, administrasi kependudukan, layanan kesehatan, serta sektor pendidikan. Dalam kerangka ini, pandemi dapat dipahami sebagai faktor pemicu (trigger) yang mendorong akselerasi digitalisasi pelayanan publik yang sebelumnya berkembang secara bertahap. Transformasi digital tidak lagi diposisikan semata sebagai agenda pembangunan jangka panjang, melainkan sebagai kebutuhan mendesak dalam menjaga fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Konsekuensinya, pemerintah melakukan percepatan pengembangan dan implementasi berbagai inovasi layanan berbasis digital, seperti integrasi sistem layanan, penyederhanaan prosedur birokrasi, serta perluasan akses masyarakat melalui platform daring. Dengan demikian, Percepatan transformasi pelayanan publik digital selama masa pandemi tidak hanya merefleksikan respons teknis terhadap situasi krisis, tetapi juga menunjukkan adanya penyesuaian dalam tata kelola pemerintahan terhadap perubahan kondisi sosial dan institusional. Pandemi menegaskan bahwa digitalisasi

pelayanan publik merupakan instrumen strategis bagi pemerintah untuk menjaga efektivitas, efisiensi, dan kesinambungan pelayanan publik di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. (Hendriyaldi dkk., 2022)

Dalam satu dekade terakhir, Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dalam agenda transformasi digital yang ditopang oleh kebijakan strategis pemerintah, peningkatan penetrasi internet, serta sinergi dengan sektor swasta. Pada ranah pemerintahan, inisiatif digitalisasi diawali melalui pengembangan berbagai layanan publik berbasis elektronik, seperti e-Filing, dan e-KTP, yang kemudian diperluas ke dalam kerangka e-government, yakni integrasi menyeluruh antar komponen sistem pemerintahan mencakup proses bisnis, data, aplikasi, infrastruktur teknologi, dan aspek keamanan dalam suatu arsitektur terpadu berbasis Enterprise Architecture. Upaya tersebut diperkuat melalui pembangunan infrastruktur dan tata kelola digital nasional, antara lain melalui program Palapa Ring, kebijakan satu data Indonesia yang mendorong integrasi dan interoperabilitas data lintas instansi, serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai kerangka regulatif dan operasional transformasi birokrasi digital. Di saat yang sama, sektor telekomunikasi memperluas jangkauan jaringan 4G dan mulai mengimplementasikan teknologi 5G di sejumlah kota besar, guna meningkatkan kualitas dan mempercepat pertumbuhan ekosistem digital yang lebih inklusif. (Munara, 2024)

Transformasi digital di Indonesia dihadapkan pada tantangan yang bersifat multidimensional, mencakup aspek teknis, sosial, kelembagaan, dan kebijakan publik. Secara teknis, ketimpangan pembangunan infrastruktur digital masih menjadi persoalan utama, terutama di wilayah terpencil dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan internet berkualitas serta teknologi canggih. Dari sisi sosial, tingkat literasi digital masyarakat yang relatif rendah membatasi pemanfaatan teknologi secara produktif dan aman, sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap risiko keamanan siber. Tantangan ini diperparah oleh keterbatasan kesiapan sumber daya manusia, khususnya kurangnya tenaga kerja dengan kompetensi teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, kesenjangan adopsi teknologi antarsektor masih terlihat jelas, di mana perilaku usaha mikro, kecil, dan

menengah cenderung tertinggal dibandingkan perusahaan besar akibat keterbatasan pengetahuan, kapasitas, dan pendanaan. Pada ranah kebijakan, regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi serta proses birokrasi yang lambat sering menghambat inovasi dan implementasi solusi digital. Isu keamanan dan perlindungan data juga menjadi perhatian penting, mengingat kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap privasi data masih terbatas dan penegakan regulasi terkait masih dalam tahap awal. Disamping itu, resistensi terhadap perubahan yang berakar pada budaya organisasi dan kebiasaan kerja konvensional turut memperlambat proses transformasi. Terakhir, minimnya akses pendanaan serta lemahnya kolaborasi antar pemangku kepentingan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan komunitas menjadi faktor penghambat yang secara kolektif memperlambat percepatan transformasi digital secara inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. (Fankychristian, 2025)

Kemajuan Indonesia dalam transformasi digital sejauh ini dapat dikatakan *on the right track* (berada dalam jalur benar) meskipun masih ada tantangan atau kesenjangan (gap) yang harus diatasi. Pertama, persoalan pemerataan infrastruktur digital masih menjadi isu fundamental. Disparitas akses internet antara wilayah Jawa dan kawasan luar Jawa, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), menunjukkan bahwa konektivitas belum sepenuhnya inklusif. Selain itu, implementasi jaringan 5G masih terpusat di kota-kota besar sehingga belum mampu menjangkau wilayah dengan tingkat kebutuhan akses yang tinggi namun kapasitas infrastruktur terbatas. Kedua, tingkat literasi digital masyarakat relatif belum memadai, khususnya di wilayah perdesaan. Kondisi ini menuntut penguatan program peningkatan kapasitas digital yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Upaya tersebut penting tidak hanya untuk memperluas basis talenta digital nasional, tetapi juga untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan digital serta mendorong pelaku UMKM agar mampu memanfaatkan platform digital guna meningkatkan produktivitas, daya saing, dan inklusi ekonomi. Ketiga, kesenjangan keterampilan digital di pasar tenaga kerja masih tergolong tinggi. Indikator digital skills gap menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri berbasis teknologi. Sejumlah temuan riset nasional bahkan

mengindikasikan bahwa mayoritas perusahaan di Indonesia menghadapi kendala dalam merekrut lulusan yang memiliki kompetensi digital inti yang relevan dengan dinamika industri saat ini. Keempat, kerangka regulasi dan kebijakan belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan teknologi mutakhir seperti kecerdasan artifisial, blockchain, maupun tata kelola perlindungan data. Ketidaksiapan regulasi yang adaptif berpotensi menghambat inovasi dan menurunkan daya saing Indonesia dibandingkan negara-negara Asia lain yang lebih progresif dalam membangun ekosistem regulasi digital. Selain itu, aspek keamanan siber dan perlindungan data pribadi juga memerlukan perhatian yang lebih serius. Intensifikasi aktivitas digital secara otomatis meningkatkan potensi risiko serangan siber dan penyalahgunaan data. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan digital, harmonisasi regulasi, serta pembangunan kepercayaan publik terhadap ekosistem digital menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan transformasi digital nasional. (Munara, 2024)

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak dapat dilakukan hanya melalui kebijakan nasional semata, tetapi juga memerlukan dukungan kerjasama internasional. Kerjasama tersebut dibutuhkan untuk mempercepat pengembangan teknologi, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan digital. Dalam upaya tersebut, Indonesia menjalin kerjasama dengan Korea Selatan, yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem e-government paling maju di dunia. Pengalaman Korea Selatan dalam membangun layanan pemerintahan digital yang terintegrasi dan efektif menjadi nilai penting bagi Indonesia dalam mendukung proses transformasi digital sektor publik. Melalui berbagai program kerjasama yang melibatkan Kementerian PANRB, Ministry of the Interior and Safety (MoIS), dan National Information Society Agency (NIA), kedua negara berupaya memperkuat pengembangan pemerintahan digital serta meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi di Indonesia.

Di sisi lain tata kelola pemerintahan di Korea Selatan telah mengadopsi sistem berbasis elektronik atau e-government secara menyeluruh, baik pada tingkat

pemerintahan pusat maupun daerah. Implementasi sistem ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan efektivitas kinerja birokrasi serta kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Atas keberhasilan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menempatkan Korea Selatan sebagai negara dengan indeks e-government terbaik di dunia selama tiga kali berturut-turut sejak tahun 2013. Upaya pengembangan e-government di Korea Selatan mulai dipercepat sejak awal tahun 2000 melalui berbagai langkah transformasi yang komprehensif. Transformasi tersebut mencakup berbagai aspek penting, seperti tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur digital, pengelolaan pusat data, hingga pengembangan aplikasi layanan publik. Dalam aspek tata kelola, pengembangan e-government diarahkan melalui sebuah master plan yang disusun oleh Ministry of the Interior and Safety (MoIS) yang memiliki fungsi serupa dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Indonesia. Implementasi kebijakan tersebut diterapkan pada seluruh tingkat pemerintahan dengan dukungan kerangka kerja e-Government Framework, sehingga proses pelaksanaannya dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien. Melalui mekanisme ini, investasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (ICT) bahkan dapat dihemat hingga 30%. Pada aspek infrastruktur, pengembangan jaringan internet, penyediaan server, serta sistem keamanan informasi berada di bawah koordinasi langsung MoIS dengan dukungan penuh dari kementerian Keuangan. Sementara itu, pengelolaan teknisnya dilaksanakan oleh masing-masing instansi pemerintah. Pengelolaan pusat data bagi instansi pemerintah pusat juga dilakukan secara terintegrasi melalui National Computing and Information Service (NCIS), yang mendapatkan dukungan sumber daya dan pendanaan yang memadai dari pemerintah. Dalam hal pengembangan aplikasi layanan publik, pemerintah Korea Selatan memberikan tanggung jawab pembinaan dan koordinasi kepada National Information Society Agency (NIA), sebuah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah koordinasi MoIs. Lembaga ini memiliki kewenangan dalam mengarahkan pengembangan berbagai aplikasi layanan publik sekaligus menyusun e-Government Framework. Proses pengembangan teknis aplikasi sebagian besar dilakukan oleh sektor swasta sebagai penyedia layanan

(provider), sehingga turut mendorong pertumbuhan investasi di sektor teknologi. Sejak tahun 2000, NIA telah mengembangkan layanan publik berbasis aplikasi generik yang dikenal dengan nama Minwon24. Platform tersebut menyediakan sekitar 24 jenis layanan aplikasi yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintah secara cepat, sederhana, dan efisien. Sebagai contoh, layanan penerbitan sertifikat tempat tinggal yang sebelumnya memerlukan lima tahapan prosedur administrasi berhasil disederhanakan menjadi hanya satu tahapan saja. Selain itu, terdapat sembilan layanan aplikasi yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat karena inovasi dan efisiensinya, antara lain layanan registrasi manajemen pembangunan, registrasi tanah, peta registrasi tanah, sertifikat pembayaran pajak regional, informasi regulasi penggunaan lahan, sertifikat registrasi kendaraan, sertifikat vaksinasi, sertifikat, pembayaran pajak, serta sertifikat pajak daerah. (Menpanrb, 2016)

Karena keterbatasan kemampuan negara-negara berkembang dalam menciptakan teknologi baru, menjalin kerjasama dengan negara lain menjadi pilihan yang baik, seperti yang dilakukan Indonesia dengan Korea Selatan. Salah satu bentuk kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan adalah di sektor teknologi. Korea Selatan telah menunjukkan kepada dunia bahwa pelayanan publik tidak selalu harus lambat, rumit, dan penuh birokrasi. Sebaliknya, Korea Selatan membuktikan bahwa dengan komitmen yang kuat dan pemanfaatan teknologi secara maksimal, pelayanan publik dapat berlangsung dengan cepat, akurat, dan responsif. Salah satu kekuatan utama dalam pelayanan publik di Korea Selatan adalah integrasi teknologi digital ke dalam sistem birokrasi mereka. Melalui e-government, pemerintah menggabungkan berbagai layanan dalam satu platform yang mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Portal seperti GOV.KR dan e-People menawarkan layanan sepanjang waktu, mulai dari pengajuan dokumen, pembayaran pajak, hingga pengaduan. Ini menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak hanya tersedia, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehari-hari. (Rahmadani, 2025)

Hubungan antar negara yang dibangun antara Indonesia dan Korea Selatan telah ada sejak lama, dengan resmi dimulainya pada bulan Agustus 1966.

Keterikatan antara Indonesia dan Korea Selatan dipicu oleh beberapa alasan, terutama di sektor ekonomi seperti perdagangan bebas, yang sangat berperan dalam memperkuat kerjasama di antara kedua negara. Hal ini juga berdampak pada berbagai sektor lainnya, termasuk teknologi. Indonesia dan Korea Selatan saling melengkapi, di mana masing-masing memiliki potensi untuk saling mendukung. Di satu sisi, Indonesia memerlukan investasi, modal, serta berbagai produk teknologi. Di sisi lain, Korea Selatan membutuhkan sumber daya alam, mineral, serta pasar besar yang dimiliki Indonesia. Korea Selatan menjadi alternatif yang baik untuk sumber teknologi, terutama dalam industri berat, IT, dan telekomunikasi. (Leonardo, 2019)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memperkuat hubungan antara Indonesia dan Ministry of the Interior and Safety (MoIS) Korea Selatan untuk meningkatkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju terciptanya pemerintahan digital. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat kerangka Kerjasama dalam Pusat Kerjasama Pemerintahan Digital (DGCC). Korea Selatan dipilih sebagai mitra kerjasama Indonesia karena negara tersebut berhasil menduduki posisi teratas di dunia dalam Indeks Pengembangan e-government pada tahun 2014, 2016, dan 2018 secara berurutan. Dengan demikian, Indonesia dapat dengan cepat menerapkan layanan digital yang terintegrasi, seperti yang sudah dilakukan oleh Korea Selatan. (KemenPanrb, 2022a)

Ruang lingkup kolaborasi melibatkan peningkatan kualitas dalam perumusan kebijakan serta perencanaan dan pelaksanaan inovasi dalam sistem administrasi pegawai, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan rekrutmen, pengembangan SDM, manajemen kinerja dan budaya kerja, peningkatan kualitas manajemen talenta nasional, struktur gaji, tunjangan, pensiun, serta upaya pencegahan korupsi di area aparatur sipil negara. Kerjasama ini akan diwujudkan melalui pertukaran kunjungan pimpinan senior, berbagi pengetahuan, pengalaman, dan publikasi penelitian, pertemuan para ahli, program magang, serta bentuk kerjasama lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam konteks aparatur sipil negara. Kemudian melahirkan enam kesepakatan, yaitu MoU

mengenai Keimigrasian, MoU mengenai Kerjasama Ekonomi, MoU mengenai Kerjasama Administrasi Pegawai, MoU mengenai Pertukaran dan Kerjasama di bidang legislasi, MoU mengenai Kerjasama Keamanan, MoU mengenai Kerjasama Revolusi Industri 4.0. (KemenPanrb, 2018a)

Mengapa kolaborasi dalam teknologi ini menjadi sangat krusial, sebab melalui kerjasama tersebut, kedua negara dapat melakukan pengalihan pengetahuan, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi yang lebih canggih untuk memperkuat sistem pelayanan publik di tingkat nasional dan daerah. Bagi Indonesia, kolaborasi dengan Korea Selatan dapat mempercepat proses modernisasi dalam birokrasi, meningkatkan akses layanan untuk masyarakat, dan memperkuat infrastruktur digital yang bersifat inklusif. Untuk Korea Selatan, kemitraan ini memberikan kesempatan untuk memperluas pengaruh strategis di kawasan ASEAN, menguatkan posisinya sebagai negara penghasil teknologi pemerintahan, serta membuka peluang bagi industri untuk berpartisipasi dalam proyek layanan publik digital di Indonesia.

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari bagi Indonesia dalam menghadapi perkembangan global serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Berbagai langkah telah diupayakan oleh pemerintah melalui pembangunan infrastruktur teknologi, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta pengembangan beragam layanan publik berbasis digital. Meskipun demikian, proses transformasi tersebut masih dihadapkan pada sejumlah kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur digital, kesiapan sumber daya manusia, serta kerangka regulasi yang belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan teknologi. Dalam kondisi demikian, kerjasama dengan negara yang memiliki pengalaman dan kapabilitas lebih maju di bidang teknologi digital menjadi strategi yang penting untuk mempercepat proses modernisasi pemerintahan. Korea Selatan, yang dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat perkembangan e-government yang sangat maju, dipandang sebagai mitra strategis bagi Indonesia dalam memperkuat kapasitas pemerintahan digital. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk serta implementasi

kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam mendukung perkembangan transformasi pelayanan publik berbasis digital di Indonesia.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang peneliti telah paparkan pada bagian Latar Belakang Masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan peneliti rumuskan yaitu:

1. Bagaimana pelayanan publik digital di Indonesia?
2. Bagaimana perkembangan pelayanan publik digital di Korea Selatan?
3. Bagaimana implementasi kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam transformasi pelayanan publik digital?

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tetap terarah dan mendalam maka peneliti akan memberikan ruang lingkup dan batasan masalah yang dimana pembahasan mengenai pelayanan publik digital di Indonesia dalam penelitian ini ditempatkan dalam kerangka kerjasama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan di bidang transformasi digital pemerintahan (e-government). Kerangka ini dipilih karena pengembangan pelayanan publik digital di Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kebijakan yang bersifat internal, melainkan juga sebagai hasil dari interaksi dan kolaborasi antar pemerintah. Kolaborasi tersebut mencakup pertukaran pengetahuan, dukungan teknis, serta adopsi praktik terbaik yang bersumber dari negara mitra. Dalam hal ini, Korea Selatan diposisikan sebagai mitra strategis karena reputasinya sebagai salah satu negara dengan tingkat kematangan e-government yang paling maju secara global. Kemudian kerjasama tersebut diwujudkan melalui diplomasi teknologi yang melibatkan institusi pemerintah terkait, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan National Information Society Agency serta Ministry of the Interior and Safety. Melalui mekanisme ini, pelayanan publik digital di Indonesia dipahami sebagai keluaran dari proses penguatan kapasitas negara yang bersifat kolaboratif, bukan hanya sebagai hasil kebijakan domestik, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika kerjasama bilateral. Selain itu, kerjasama teknis tersebut memperoleh dukungan dari kerangka ekonomi komprehensif Indonesia-

Korea Selatan yang membuka peluang kolaborasi lintas sektor, termasuk pengembangan teknologi dan transformasi digital pemerintahan. Pemilihan periode penelitian 2022-2025 didasarkan pada sejumlah pertimbangan akademis dan empiris. Pertama, periode ini merupakan fase pascapandemi Covid-19 ketika pemerintahan Indonesia secara intensif mendorong percepatan digitalisasi pelayanan publik sebagai respons atas keterbatasan layanan tatap muka serta tuntutan efisiensi birokrasi. Kedua, dalam rentang waktu tersebut terlihat penguatan kerjasama konkret antara Indonesia dan Korea Selatan di bidang pemerintahan digital, yang ditandai dengan pelaksanaan proyek percontohan, penguatan kerangka kelembagaan, serta meningkatnya intensitas pertukaran teknis dan kebijakan. Ketiga, periode 2022-2025 mempresentasikan tahap transisi penting dari implementasi e-government menuju pemerintahan digital yang lebih terintegrasi, sehingga relevan untuk dianalisis guna menilai kontribusi kerjasama bilateral terhadap pengembangan pelayanan publik digital di Indonesia. Keempat, pembatasan temporal ini dimaksudkan untuk menjaga fokus penelitian agar tetap kontekstual, aktual, dan memiliki keterkaitan langsung dengan dinamika kebijakan transformasi digital yang masih berlangsung. Dengan demikian, penelitian ini menganalisis pelayanan publik digital di Indonesia dalam kerangka kerjasama bilateral Indonesia dan Korea Selatan di bidang transformasi digital pemerintahan, dengan periode 2022-2025 sebagai fase strategis percepatan dan implementasi kebijakan digital yang paling relevan untuk dikaji secara akademis.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam dinamika kerjasama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan dalam ranah transformasi digital pemerintahan, dengan fokus utama pada pengembangan pelayanan publik berbasis digital selama periode 2022-2025. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji kondisi dan perkembangan pelayanan publik digital di Indonesia dalam konteks penerapan transformasi digital pemerintahan.

2. Menganalisis perkembangan dan praktik pelayanan publik digital di Korea Selatan sebagai negara dengan tingkat kematangan e-government yang tinggi.
3. Menjelaskan bentuk, mekanisme, serta implementasi kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam transformasi pelayanan publik digital, termasuk peran institusi terkait dan kontribusinya terhadap penguatan kapasitas pemerintahan digital di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dilampirkan, maka kegunaan penelitian akan di bagi menjadi dua:

1.4.2.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya pengetahuan hubungan internasional, khususnya pada bidang kerjasama teknologi dan transformasi digital.

1.4.2.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi akademik bagi penelitian selanjutnya mengenai kerjasama bilateral Indonesia dan Korea Selatan dalam bidang teknologi informasi dan layanan publik digital.

1.5 Kerangka Teoritis-Konseptual

1.5.1 Konsep Kerjasama Bilateral

Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, Kerjasama antarnegara adalah realisasi dari keadaan komunitas yang saling bergantung. Dalam menjalin kerjasama ini, diperlukan sebuah platform untuk memfasilitasi aktivitas tersebut. Tujuan dari kerjasama ini ditetapkan oleh setiap pihak yang terlibat serta bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat dan negaranya. Kerjasama antarnegara ini dapat terjadi karena adanya kebutuhan yang bersifat global yang mencakup aspek ideologi, ekonomi, politik, sosial, lingkungan, budaya, pertahanan, dan keamanan. (Perwita & Yani, 2005)

Berdasarkan pendapat Sukawarsini Djelantik, hubungan bilateral antara dua negara menyediakan kesempatan bagi setiap negara untuk melakukan perundingan secara langsung, mengutarakan kepentingan, dan mencari Solusi yang saling

menguntungkan melalui saluran diplomatik yang resmi oleh pihak-pihak seperti pemimpin negara, menteri luar negeri, duta besar, serta kementerian teknis yang relevan. (Djelantik, 2008)

Konsep kerjasama antara dua negara menjadi elemen yang sangat krusial dalam analisis interaksi internasional. Kerjasama bilateral adalah relasi kerjasama yang terjalin antara dua bangsa dalam beragam aspek kehidupan demi mencapai sasaran bersama. Kerjasama bilateral bisa berupa kerjasama diplomatik yang ditunjukkan dengan hubungan yang dekat antara institusi-institusi dari kedua negara. (Krisna, 1993)

Kerjasama antara dua negara menurut Kenneth N. Waltz (1979), adalah suatu bentuk interaksi yang terjadi dalam sistem internasional yang anarkis, di mana tidak ada otoritas tertinggi yang mengatur perilaku negara-negara. Dalam perspektif neorealisme struktural yang dikemukakan oleh Waltz, negara berperan sebagai aktor utama yang beroperasi secara rasional demi mempertahankan eksistensi dan kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, kerja sama antar negara tidak bergantung pada kepercayaan, nilai moral, atau solidaritas, tetapi lebih kepada perhitungan kepentingan strategis serta distribusi kekuasaan. Negara akan bersedia untuk melakukan kerja sama bilateral jika hal itu memberikan keuntungan yang lebih dan tidak mengurangi kekuatannya dibandingkan negara lain. Waltz menekankan bahwa negara lebih memprioritaskan keuntungan relatif ketimbang keuntungan keseluruhan, sehingga kerja sama bisa saja ditolak meskipun menguntungkan, jika salah satu pihak merasa mendapatkan lebih banyak keuntungan dan berpotensi memperkuat posisinya. Dengan demikian, dalam pandangan Waltz, kerja sama bilateral bersifat pragmatis, instrumental, dan cenderung sementara, karena sangat dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur kekuasaan dan kepentingan negara di dalam sistem internasional. (Waltz, 1979)

Menurut Plano dan Olton (1990), kerja sama bilateral adalah jenis kolaborasi antara dua negara yang pada dasarnya terkait dengan kepentingan nasional dari masing-masing negara. Kepentingan nasional merupakan aspek penting karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup bangsa dan negara,

kebebasan, integritas wilayah, keamanan, pertahanan, serta kesejahteraan ekonomi. (Plano & Olton, 1990)

Kerjasama antar negara bisa membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi, contohnya adalah kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan. Dalam upayanya untuk memajukan negara, Indonesia perlu menjalin kemitraan dengan Korea Selatan untuk mengembangkan sistem e-government yang dimilikinya. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, terutama dalam hal e-government. Pengembangan e-government dianggap sangat penting, mengingat kondisi saat ini yang belum optimal di Indonesia, sementara kerjasama ini akan lebih fokus pada perbaikan layanan publik serta pembentukan pusat kolaborasi untuk e-government. Partisipasi dari Korea Selatan diyakini dapat membantu mengatasi berbagai masalah e-government di Indonesia yang masih berjalan kurang maksimal, sehingga dapat tercapai sistem pemerintahan yang baik, yaitu efektif, efisien, dan transparan. Dengan kata lain, kerjasama bilateral antara kedua negara diharapkan mampu menghadirkan manfaat bagi kedua pihak sekaligus menguatkan hubungan di antara kedua negara. (Purnamasari, 2019)

Dalam penelitian ini, konsep kerjasama bilateral digunakan untuk memahami hubungan kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam upaya pengembangan transformasi digital pemerintahan. Melalui kerjasama tersebut, kedua negara melakukan berbagai bentuk kolaborasi, seperti pertukaran pengetahuan, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan program-program pemerintahan digital.

1.5.2 Konsep Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan perubahan signifikan dan mendasar dalam metode operasional bisnis atau organisasi serta cara mereka berinteraksi dengan pelanggan menggunakan teknologi digital. Proses transformasi ini pada dasarnya bertujuan untuk meraih sasaran strategis dan memperbaiki kinerja. (Andersson dkk., 2018)

Transformasi digital dapat dipahami sebagai proses perubahan komprehensif dalam cara organisasi atau institusi menjalankan fungsi, proses kerja,

dan layanan melalui pemanfaatan teknologi digital secara strategis. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan adopsi teknologi baru, tetapi juga mencakup perubahan cara berpikir, budaya organisasi, sistem tata kelola, serta pola kerja agar organisasi menjadi lebih adaptif, efisien, dan tanggap terhadap perkembangan lingkungan digital. Dengan demikian, transformasi digital merupakan upaya berkelanjutan yang menuntut keterpaduan antara pemanfaatan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan penyesuaian kebijakan organisasi. Dalam konteks e-government, transformasi digital sebagaimana diuraikan dalam buku tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mengubah penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya bersifat manual, birokratis, dan terpisah-pisah menjadi sistem pemerintahan berbasis digital yang saling terintegrasi. E-government tidak semata-mata memindahkan layanan publik ke media daring, melainkan mencerminkan perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan administrasi, hingga pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi digital seperti sistem informasi terintegrasi, pengelolaan data, dan platform layanan digital, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta mutu pelayanan publik. buku Transformasi Digital menegaskan bahwa implementasi transformasi digital dalam e-government harus disertai dengan perubahan budaya kerja aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perhatian serius terhadap aspek etika dan keamanan digital. Tanpa kesiapan kelembagaan dan kerangka regulasi yang memadai, transformasi digital berpotensi berhenti pada inovasi teknis semata tanpa menghasilkan dampak nyata terhadap kinerja pemerintahan. Oleh sebab itu, dalam kerangka e-government, transformasi digital dipandang sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang modern, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik di era digital. (Erwin dkk., 2023)

Proses transformasi digital telah melahirkan berbagai tatanan sosial baru dalam kehidupan masyarakat. Pertama, pola berpakaian masyarakat kini semakin banyak dipengaruhi oleh budaya yang berkembang dan tersebar luas melalui media sosial. Fenomena ini memunculkan gaya berbusana yang lebih modern, fleksibel,

dan dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya generasi milenial. Kedua, terjadi perubahan gaya hidup. Perkembangan teknologi digital mempermudah individu dalam mengakses beragam informasi melalui internet, sehingga secara tidak langsung membentuk perubahan preferensi, kebiasaan, serta identitas sosial akibat paparan konten dari media sosial. Ketiga, perubahan juga tampak dalam penggunaan bahasa. Bahasa daerah mulai semakin jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan cenderung tergantikan oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, terutama dalam komunikasi digital. Budaya digital merupakan sebuah konsep yang berakar pada pemanfaatan teknologi dan internet, yang membentuk pola baru dalam cara masyarakat berinteraksi, berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi di lingkungan sosial. Perkembangan budaya digital sangat bergantung pada tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, peralihan menuju budaya digital perlu dihadapi dengan pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik budaya digital itu sendiri. Masyarakat tidak hanya dituntut untuk memahami transformasi digital dari aspek teknis, tetapi juga dari sisi psikologis dan sosial. Budaya digital harus dipahami secara menyeluruh dan kolaboratif, bukan secara terpisah-pisah. Dengan penguatan budaya digital, diharapkan terbangun pemahaman bersama di tingkat masyarakat agar nilai-nilai tata krama dan etika tetap dijunjung tinggi dalam ruang digital secara komprehensif. (Ayu dkk., 2022)

Transformasi digital merupakan proses perubahan dalam cara pelaksanaan suatu pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Berbagai sektor telah menerapkan transformasi ini, seperti bidang pendidikan melalui e-learning, dunia usaha dengan e-bisnis, sektor perbankan melalui e-banking, serta pemerintahan dengan e-government, dan masih banyak bidang lainnya. Pada dasarnya, transformasi digital bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja dan pengelolaan dokumen pendukung melalui pemanfaatan basis data. Konsep paperless menjadi sasaran utama, di mana dokumen fisik sebagai bukti transaksi digantikan oleh sistem berbasis database yang lebih sederhana, fleksibel, dan dapat diakses kapan saja. (Danuri, 2019)

Transformasi digital tidak dapat dipahami hanya sebagai penerapan teknologi dalam aktivitas organisasi, tetapi juga mencerminkan proses perubahan yang bersifat komprehensif dalam sistem kerja, mekanisme tata kelola, serta pola penyelenggaraan layanan dengan memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan. Dalam ranah pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang memungkinkan integrasi data antar instansi, penyederhanaan prosedur birokrasi, serta perluasan akses masyarakat terhadap layanan publik secara lebih cepat, efektif, dan mudah dijangkau. Meskipun demikian, pelaksanaan transformasi digital di negara berkembang, termasuk Indonesia, masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia yang belum merata, serta kapasitas kelembagaan pemerintah dalam mengelola sistem digital yang terintegrasi. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, kerjasama internasional menjadi salah satu pendekatan strategis untuk mempercepat proses transformasi digital. Kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan di bidang teknologi informasi dan pemerintahan digital dapat dipandang sebagai bentuk kolaborasi yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas Indonesia dalam mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis digital. Korea Selatan dikenal sebagai negara yang memiliki tingkat perkembangan e-government yang sangat maju serta pengalaman yang luas dalam membangun sistem pemerintahan digital yang terintegrasi dan efisien. Melalui kerjasama bilateral ini, Indonesia memperoleh peluang untuk memanfaatkan berbagai bentuk dukungan, seperti pertukaran pengetahuan, alih teknologi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan tata kelola pemerintahan digital. Dengan demikian, kerjasama antara kedua negara tidak hanya mempererat hubungan bilateral, tetapi juga berkontribusi dalam mendorong percepatan transformasi digital pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

1.5.3 Konsep E-government

Seperti yang disebutkan menurut Abdullah, Rogerson, Fairweather, dan Prior, implementasi e-government mampu mendukung dan memperbaiki kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini e-

government telah dikembangkan di berbagai negara, baik negara yang sudah maju maupun negara yang sedang berkembang. (AL-Shehry, 2006)

E-government adalah istilah yang masih relatif baru bagi banyak masyarakat di negara yang sedang berkembang. Dalam banyak kasus, istilah tersebut sering kali disalahpahami. Secara prinsip, e-government sebenarnya bukanlah hal yang asing. Banyak pemerintah dari berbagai negara, baik yang telah maju maupun yang sedang berkembang, sudah lama memanfaatkan sistem komputer untuk memfasilitasi dan mendukung tugas administrasi serta pengolahan data, yang pada akhirnya bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Perbedaan utama antara konsep e-government yang kita kenal saat ini dengan penerapan di masa lalu terletak pada luasnya penggunaan sistem komputer dan informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya, seperti pegawai, instansi pemerintah lainnya, serta perusahaan swasta. (Cahyadi, 2003)

Penerapan e-government bukan semata soal menekan biaya dan mengikuti perkembangan teknologi. Lebih dari itu, e-government terkait erat dengan tujuan mulia, yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal ini meliputi transparansi, kemudahan akses informasi, kebijakan yang tepat sasaran, peningkatan mutu pelayanan publik, serta partisipasi aktif dari masyarakat. (Gil-Garcia, 2012)

Kemudian, menurut Budi Rianto dkk, mereka menyimpulkan bahwa e-government merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk melaksanakan fungsi serta administrasi pemerintah dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi atau informasi dan komunikasi. Aplikasi e-government memberikan peluang untuk meningkatkan dan memaksimalkan interaksi antara lembaga pemerintah, serta hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Proses interaksi ini terjadi melalui pemanfaatan teknologi informasi, yaitu kolaborasi atau kombinasi antara komputer dan jaringan komunikasi. (Lestari & Rianto, 2012)

E-government adalah sebuah inisiatif untuk memperbaiki kinerja pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi digital. Hal ini mencakup penataan sistem pengelolaan dan proses kerja di lembaga pemerintah, dimana teknologi

informasi dan komunikasi dimanfaatkan secara optimal. Sederhananya, e-government adalah bagaimana pemerintah menggunakan teknologi informasi untuk menyampaikan informasi dan pelayanan kepada warga, kebutuhan bisnis, serta berbagai urusan lain yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan. E-government dapat diimplementasikan dalam bidang legislatif, yudikatif, atau administrasi negara, dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi internal, memberikan pelayanan publik, atau mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih partisipatif. (Karso dkk., 2024)

Dari berbagai uraian konsep e-government yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara mendasar, e-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terkini oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, sektor bisnis, dan di dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Upaya ini diwujudkan melalui penggunaan aplikasi berbasis web yang disertai perubahan proses kerja, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, dengan tujuan mengurangi tindak korupsi, mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka, mempermudah akses layanan, meningkatkan pendapatan negara, serta menghemat pengeluaran dalam pengelolaan pemerintahan. (Irawan, 2017)

Secara konseptual, e-government merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan efektivitas administrasi, transparansi, akuntabilitas, serta mutu pelayanan publik. Penerapan e-government memungkinkan berbagai prosedur birokrasi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional untuk diintegrasikan ke dalam sistem digital, sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan juga mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks perkembangan global yang semakin terdorong oleh digitalisasi, tingkat implementasi e-government sering dijadikan sebagai salah satu indikator penting dalam menilai kemajuan serta kualitas tata kelola pemerintahan suatu negara. Dalam rangka memperkuat pengembangan e-government, Indonesia menjalin kerjasama dengan sejumlah negara yang memiliki tingkat kemajuan teknologi dan

pengalaman yang lebih maju di bidang pemerintahan digital, salah satunya Korea Selatan. Negara tersebut dikenal secara luas sebagai salah satu pelopor dalam pengembangan sistem e-government yang terintegrasi dan efisien serta telah memperoleh pengakuan internasional atas keberhasilannya. Kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan di bidang pemerintahan digital diarahkan untuk meningkatkan kapasitas Indonesia melalui berbagai bentuk kolaborasi, seperti pertukaran pengetahuan, alih teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan tata kelola pemerintahan digital. Melalui kerjasama tersebut, Indonesia diharapkan mampu mempercepat pengembangan sistem e-government serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan selaras dengan perkembangan teknologi digital.

1.6 Asumsi Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan telah menjadi kebutuhan yang bersifat strategis bagi negara-negara modern, terutama dalam merespons perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dipandang mampu meningkatkan efisiensi birokrasi, memperkuat akuntabilitas, serta memperbaiki kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Meskipun demikian, implementasi transformasi digital di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur digital, kesiapan sumber daya manusia yang belum merata, serta belum optimalnya integrasi sistem antar lembaga pemerintahan. Dalam konteks tersebut, kerjasama internasional menjadi salah satu pendekatan yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penguatan kapasitas teknologi maupun tata kelola pemerintahan digital. Korea Selatan, yang dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kemajuan e-government yang tinggi, memiliki pengalaman, inovasi, serta praktik terbaik yang relevan untuk dijadikan rujukan. Dengan demikian, kerjasama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan dalam bidang transformasi digital pemerintahan diasumsikan mampu memberikan kontribusi positif terhadap

pengembangan layanan publik berbasis digital di Indonesia, terutama melalui pertukaran pengetahuan, alih teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan teknologi informasi dan sistem pemerintahan digital.

1.7 Kerangka Analisis

